



Maluku Investasi

PELOPOR INVESTASI DI MALUKU



TOPIK UTAMA

Lumbung Ikan
Nasional (LIN)
Melahirkan
Kawasan Industri
Baru di Maluku

GELIAT INVESTASI

Ada Potensi Besar
Selain Masela, Pertagas
Siap Ekspansi Bisnis Gas
di Maluku



Prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan adalah melayani, maka PTSP menjadi media interaksi, antara pemerintah dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan"

-Gubernur Maluku-

SEPUTAR INVESTASI

Maluku Jadi Sentra Ekonomi Baru di Indonesia Timur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu PROVINSI MALUKU







Foto: Istimewa

EDITO RIAL

Penerbit :

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROVINSI MALUKU

Redaksi :

Bidang Promosi Penanaman Modal
Jl. Pengeringan pantai Waihaong
No. 1 Ambon 92711 Indonesia

Telephone:

0911-353421

Fax:

0911-353421

Website:

<http://dpmtsp.malukuprov.go.id>

e-mail:

pmptsp@malukuprov.go.id

Kaya akan sumber daya alam yang melimpah di sektor kelautan dan perikanan, Maluku menyumbang 4,6 juta ton atau 37 persen dari 12,5 juta total potensi sumber daya ikan nasional. Dengan 3 wilayah penangkapan (fishing ground) dari 9 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yakni WPP 714, 715 dan 718, yang potensinya mencapai 1,62 juta ton per tahun, Maluku layak dinobatkan sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) oleh Pemerintah Indonesia.

Atas dasar ini, Pemerintah mulai mencanangkan provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional (LIN). Berdasarkan hal tersebut, maka dibangun kawasan industri dalam rangka mendukung LIN. Kawasan ini dibangun di atas lahan seluas 700 hektar berlokasi di Pulau Ambon - Desa Waai kabupaten Maluku Tengah. Pada kawasan industri tersebut akan dibangun industri pengolahan ikan dan coldstorage. Diharapkan kawasan industri tersebut memberikan efek ganda yang luas bagi ekonomi Maluku pada khususnya dan nasional pada umumnya. Sebab, adanya investasi masuk, atau beroperasinya industri akan meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor.

Ambon New Port merupakan salah satu langkah pemerintah pusat dalam mendukung Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Pelabuhan baru ini nantinya terintegrasi dengan pelabuhan logistik, pelabuhan perikanan, terminal Liquid Natural Gas (LNG), terminal peti kemas domestik dan internasional, terminal bongkar muat dan power plant.

M. Azis Tunny

Kepala Editor



DAFTAR ISI



8

Topik Utama

Lumbung Ikan Nasional (LIN) Melahirkan Kawasan Industri Baru di Maluku



13

Topik Utama

Profil Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) Provinsi Maluku

Potensi dan Peluang Investasi di Maluku _____ 28

Infrastruktur Pendukung Investasi _____ 36

Geliat Investasi _____ 40

Inovasi _____ 44



50

Seputar Investasi

Maluku Jadi Sentra Ekonomi Baru di Indonesia Timur



56

News

Duta Besar Seychelles Tertarik untuk Berinvestasi di Maluku

TOPIK UTAMA

Lumbung Ikan Nasional (LIN) Melahirkan Kawasan Industri Baru di Maluku

Photo: Web



Photo: Web

Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi berciri kepulauan di Indonesia dengan luas wilayah 712.479,65 km² yang terdiri dari luas lautan 658.294,69 km² (92,4%) dan luas daratan 54.185 km² (7,6%).

Provinsi Maluku terdiri dari 1.340 pulau, dimana pulau terbesar adalah Pulau Seram (18.625 km²), kemudian Pulau Buru (11.117 km²), disusul Pulau

Yamdena (5.085 km²), dan Pulau Wetar (3.624 km²) dan selebihnya merupakan pulau-pulau kecil. Potensi perikanan Maluku mencapai 1,62 juta ton per tahun. Potensi ini amatlah besar. Bahkan 3 (tiga) dari 9 (sembilan) wilayah fishing ground utama Indonesia, ada di Maluku, yaitu Laut Banda, Laut Seram dan Laut Arafura dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JBT) adalah sebesar 1,30 ton/tahun.



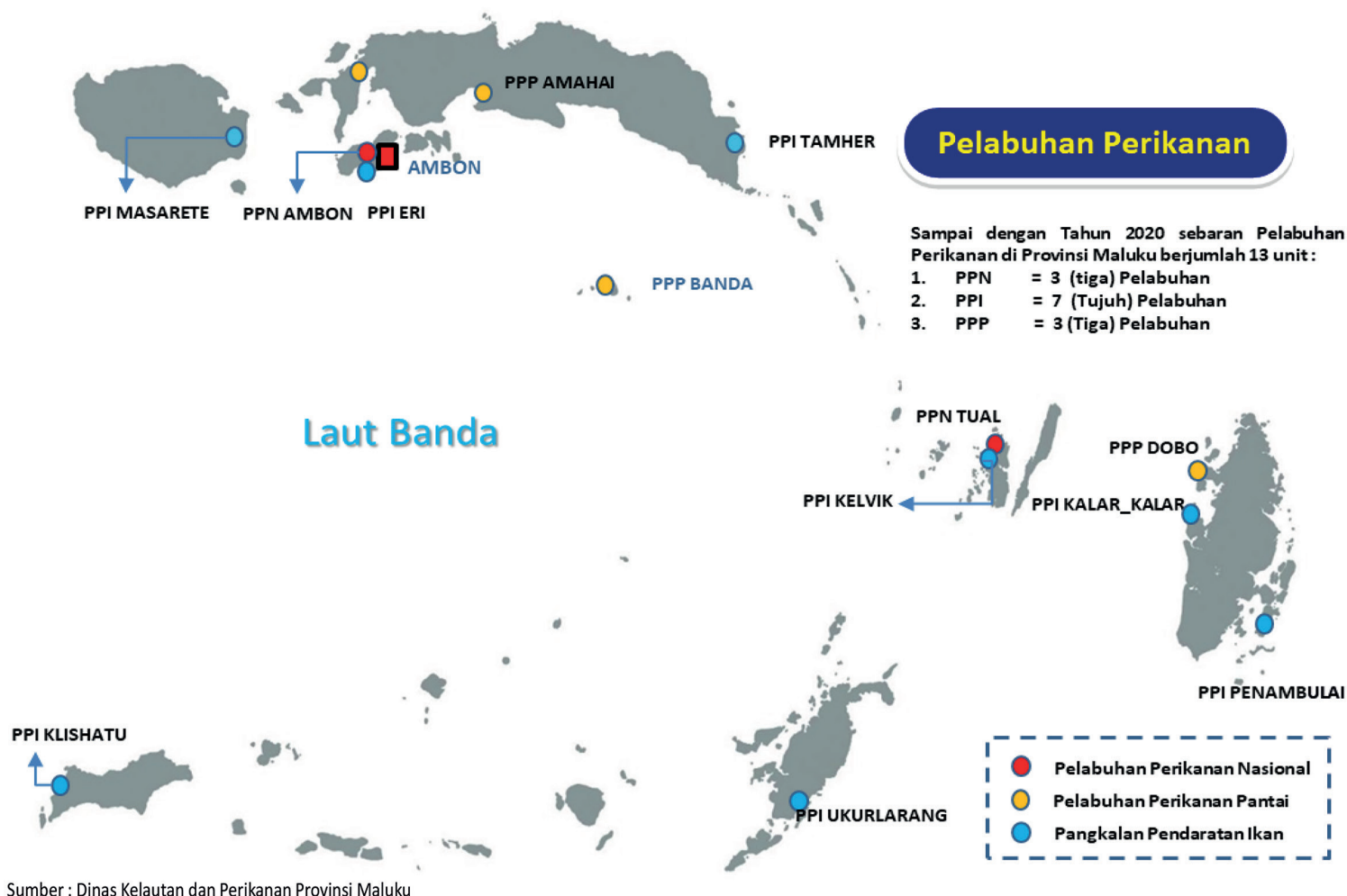
Photo: Web



LAYAK DIJADIKAN LUMBUNG IKAN NASIONAL

Dengan luas laut yang mencapai 658.294,69 km² (92,4%), laut Maluku memiliki potensi produksi ikan sebesar 1,63 juta ton pertahun, sekitar 26,3% dari produksi nasional yang mencapai 6,5 juta ton pertahun. Perikanan Maluku ini disokong oleh 3 (tiga) fishing ground utama yaitu Laut Banda, Laut Seram dan Laut Arafura.

Atas dasar ini, pemerintah mulai mencanangkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dimana sentra-sentra produksi seperti kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tenggara, dijadikan sebagai daerah penyangga utama ekspor perikanan nusantara.



Investasi Pendukung Lumbung Ikan Nasional (LIN)

Ditetapkan sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), pemerintah Provinsi Maluku merencanakan pembangunan 13 (tiga belas) Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) di 11 (sebelas) kabupaten/kota yaitu PPN Tantai (Ambon), PPN Dumar (Tual), PPI Eri (Ambon), PPI Taar (Tual), PPI Amahai, PPI Kayeli, PPI Ukur Larang, PPI Klishatu Wetar, PPI Kalar-Kalar (Aru), PPI PTP Banda, PPI Tamher SBT, PPP Piru SBB, dan PPP Dobo.

Menunjang pengembangan 13 pelabuhan perikanan ini, direncanakan pembentukan kawasan minapolitan pada gugus pulau VII yaitu di Kota Ambon dan sekitarnya, serta gugus pulau VIII yaitu kepulauan Kei (Kota Tual dan sekitarnya). Ditetapkannya kawasan minapolitan ini mendorong terbukanya investasi untuk 6 (enam) Kawasan Perhatian Investasi (KPI) di Maluku yaitu:

1. KPI Ambon dengan nilai investasi Rp 2,649 T
2. KPI Seram dengan nilai investasi Rp 40,88 T
3. KPI Tual dengan nilai investasi Rp 1,722 T
4. KPI Aru dengan nilai investasi Rp 195 T
5. KPI Saumlaki dengan nilai investasi Rp 140 T
6. KPI Wetar dengan nilai investasi Rp 13,0283 T

Kawasan Perhatian Investasi (KPI) merupakan kumpulan dari suatu atau beberapa kegiatan investasi, yang secara geografis beraglomerasi di area yang berdekatan, serta didukung oleh sistem jaringan infrastruktur yang akan memperkuat konektivitas intra dan antar wilayah sekitarnya.

Melalui pendekatan KPI ini diharapkan dukungan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan terintegrasi dengan berbagai proyek investasi swasta dan BUMN sehingga dapat disediakan secara efisien dan efektif.



Photo: Humas Maluku

Photo: Web



'Kawasan ekonomi baru yang ditargetkan akan selesai tahun 2023'

Kunjungan Tiga Menteri

Tiga menteri yaitu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, pada hari Jumat (5/2/2021) melakukan kunjungan kerja ke Ambon, Maluku dalam rangka meninjau lokasi yang direncanakan akan dibangun pelabuhan perikanan.

Dalam meninjau lokasi tersebut yang ditargetkan pembangunannya akan rampung pada tahun 2023, para menteri didampingi oleh Gubernur Maluku Murad Ismail.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa di dalam penggarapan infrastruktur pelabuhan perikanan sebagai infrastruktur dasar dalam rangka mendukung lumbung ikan nasional ini, akan dimulai dengan

proyek APBN dan kemudian akan ada partisipasi dari pihak swasta yang diundang untuk melaksanakan infrastruktur tambahan sebagai penunjang infrastruktur dasar yang akan dibiayai oleh pihak swasta tersebut.

Di sisi lain, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menekankan sektor perikanan sebagai sektor utama yang harus difokuskan sebagai ujung tombak kawasan ekonomi baru yang ditargetkan akan selesai ditahun 2023." Tidak boleh lama-lama. Karena ini perintah Pak Presiden, sehingga ketika infrastruktur dasar dalam hal ini adalah pelabuhan serta infrastruktur lainnya dapat diselesaikan dengan baik, maka industrinya sudah bisa berjalan," kata Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers bersama yang digelar di Ambon.



Pada kesempatan yang sama, menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono mengatakan salah satu tujuan pembangunan pelabuhan perikanan ini adalah agar turut meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Indonesia bagian timur khususnya di Maluku. “Jika nantinya bisa dibangun pelabuhan perikanan yang modern seperti yang dimiliki oleh Jepang, maka kenapa tidak? Bagus itu.” Kata Wahyu.

Gubernur Maluku Murad Ismail sangat mengapresiasi kehadiran proyek ini yang diharapkan agar dapat didukung oleh segenap lapisan masyarakat Maluku, agar secepatnya proyek ini dapat berjalan dengan baik sehingga bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Maluku itu sendiri.

POTENSI PERIKANAN

Dengan adanya Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku, estimasi produksi perikanan yang bisa dihasilkan dari subsektor perikanan tangkap dan budidaya bisa mencapai 750.000 ton pertahun. Sedangkan, tenaga kerja yang bisa terserap diperkirakan mencapai lebih dari 30 ribu orang. Pembangunan fasilitas infrastruktur di atas, menjadi bagian dari rencana pemerintah untuk menyiapkan ekosistem industri dalam upaya mendorong kelancaran kegiatan dan transaksi bisnis di Maluku, utamanya di kawasan Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Selain itu, ekosistem industri juga akan sangat baik untuk proses pengembangan perekonomian kawasan Timur Indonesia untuk masa

mendatang. Dengan demikian, secara bersamaan kehadiran LIN di Maluku akan mendorong perekonomian di Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

GERAI IKAN SEGAR

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah meluncurkan Gerai Ikan Segar yang berlokasi di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Ambon sebagai upaya mendukung terwujudnya Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan

Perikanan Ambon Lily Aprilya Pregiawati berharap dengan kehadiran gerai ini dapat memfasilitasi para nelayan, pembudidaya di sekitar kota Ambon untuk mempermudah akses pemasaran produk perikananannya. Selain itu BP3 Ambon juga tengah mengembangkan gerai ini menjadi Kawasan Spot Wisata Bahari, “Keberadaan Gerai Ikan Segar ini bertujuan untuk mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang direncanakan terwujud pada tahun 2023, sekaligus dapat menjadi alternatif daya tarik wisata bagi wisatawan di Maluku, khususnya di kota Ambon” pungkasnya.

Photo: Web





PROFIL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP (DPM-PTSP) PROVINSI MALUKU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Maluku merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu provinsi Maluku, dan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berkaitan dengan investasi pemerintah daerah Maluku melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor: 6 Tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dikategorikan dinas daerah provinsitipe "A" mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Pelaksana kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
4. Pembinaan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Pembinaan unit pelaksanaan teknis
6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai lingkup teknis.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas fungsinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku melayani 99 jenis perizinan yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP atas nama Gubernur Maluku

*“Lengkapi persyaratannya, dan dapatkan layanan prima kami”
(Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si)*



Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu meliputi :

1. Pemberian perizinan baru
2. Perubahan perizinan
3. Perpanjangan/daftar ulang perizinan
4. Pemberian salinan surat izin
5. Legalisasi perizinan
6. Pencabutan Izin

Pelayanan dari kami bisa anda dapatkan secara istimewa jika anda melengkapi semua persyaratan yang kami tentukan, service tersebut yakni ; mudah, murah, cepat dan tepat terkait penjelasannya akan kami bahas pada Bidang Pelayanan Perizinan PTSP.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 36 Tahun 2017 tentang: Uraian tugas jabatan pimpinan tinggi pratama administrator dan pengawas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Maluku sebagai berikut:

SEKRETARIAT

Mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum,

perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan aset pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional, di lingkup Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Lingkup Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Maluku sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapaitarget kinerja yang ditetapkan;
4. Mengkoordinasikan rencana penyusunan program kerjaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Maluku sesuai ketentuan yang bterlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efesien dan akuntabel;
5. Menyelenggarakan layanan administrasi Kepegawaian dan Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta keuangan dan aset di lingkupDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan tugas;
7. Mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Maluku sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pelaksanaan tugas;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan SekretariatDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Maluku sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh:
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan





BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan serta pemberian bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Maluku petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagikan tugas kepada bawahan di lingkup bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Maluku sesuai tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan, fungsinya agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk dan penjelasan tugas kepada bawahan di

lingkup bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Maluku sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. Menyalurkan pelaksanaan tugas bawahan lingkup bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal secara berkala sesuai aturan dan prosedur yang berlaku untuk merencanakan target kinerja yang diharapkan;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal melalui program perencanaan dan deregulasi penanaman modal serta pengembangan usaha sesuai prosedur yang berlaku secara efektif, efisien dan akuntabel;
6. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan program bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
7. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman

modal ;

8. Merumuskan dan penyediaan data informasi dan dokumentasi program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku dengan tugas-tugas sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dibantu oleh:

- Kepala Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal
- Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha

BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

“

*Menjadi yang
terdepan dalam
mempromosikan
Maluku .”*

*(Saidan Kilkoda
S.Pd.,M.Si)*

BIDANG promosi penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang promosi penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang optimal. Untuk uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional lingkup bidang promosi penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Maluku berdasarkan petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup bidang promosi penanaman modal sesuai tugas pokok

dan fungsinya agartugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;

3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup bidang promosi penanaman modal sesuai aturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada di bidang promosi penanaman modal secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai format kinerja yang diharapkan;
5. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan promosi penanaman modal melalui program pengembangan promosi dan pelaksanaan serta sarana dan prasarana promosi sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;





6. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan program promosi penanaman modal dengan dinas instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
7. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang promosi penanaman modal ;
8. Merumuskan penyediaan data Informasi dan dokumentasi penanaman modal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bidang promosi penanaman modal dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang promosi penanaman modal tugas yang dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai ketentuan yang berlaku;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala bidang promosi penanaman modal dibantu oleh:

- Kepala Seksi Pengembangan Promosi, Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal
- Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal





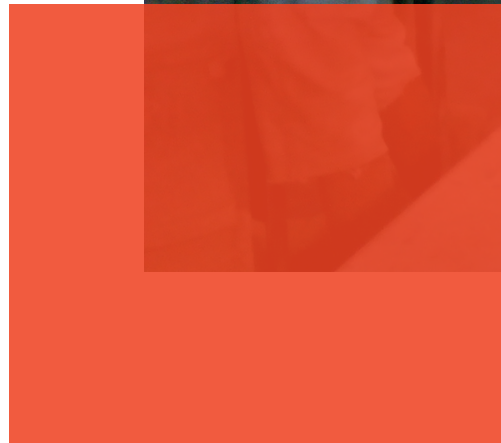
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

BIDANG pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang optimal. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional, di lingkup bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Maluku berdasarkan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Maluku;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;



3. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Merumuskan pedoman pembinaan/petunjuk teknis di bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dalam rangka pembinaan di lingkup bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
6. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan penanaman modal di daerah;
7. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Merumuskan penyediaan data potensi bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
9. Merumuskan saran dan bahan rekomendasi penyelesaian urusan pengembangan potensi sumber daya potensi dan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah di bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal;
10. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pengawasan dalam pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dengan cara membandingkan antara program kerja dan





kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal dibantu oleh:

- Kepala Seksi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.





Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

BIDANG penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:



MELAYANI BUKAN DILAYANI

1. Menyusun rencana operasional di lingkup bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan di dalam pelaksanaan tugas;



4. Menyelenggarakan tugas bawahan di lingkup bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan melalui program/kegiatan perizinan dan non perizinan I dan II.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan program penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dengan dinas, masyarakat instansi teknis;
7. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Merumuskan penyediaan data informasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan ;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non



*“Berkas lengkap izin terasa mudah “
(Kabid PTSP Provinsi Maluku)*

- perizinan sesuai tugas yang diberikan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.
- Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dibantu oleh:
- Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
 - Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

dan Non Perizinan II
Inilah yang anda dapatkan dari kami jika berkas lengkap sesuai syarat dan ketentuan :

1. Mudah : kita potong persyaratan yang berulang-ulang, yang terkesan berbelit-belit;
2. Murah : tidak dipungut biaya lainnya kecuali retribusi dan pajak ;
3. Cepat : semua izin berdasarkan SOP yang telah ditentukan ;
4. Tepat : karena semua perizinan melalui lembaga OSS dengan sistem aplikasi yang terintegrasi.



BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

"Adukan ke kami jika anda punya masalah dalam pelayanan perizinan"
(Kabid Pengaduan)

BIDANG pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dilingkup bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan berdasarkan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Maluku ;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai tugas pokok dan tanggung jawab yang

ditetapkan agar tugas-tugas tersebut dapat berjalan efektif dan efisien;

- c. Memberi petunjuk pelaksanaan teknis kepada bawahan lingkup bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai prosedur yang berlaku;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan;
- e. Mengkoordinasikan penugasan rencana kegiatan bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan melalui program pengadaan intervensi serta kebijakan dan penjelasan layanan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana

operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dalam kegiatan pengaduan, kebijakan dan pelaporan dengan dinas maupun instansi teknis terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi program pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi program pengaduan, kebijakan dan pelaporan kegiatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;



BELUM PUAS AYO KE KAMI

“

Memberikan solusi yang terbaik atas segala permasalahan anda dalam pengurusan perizinan di PTSP”

(Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan)

- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
- j. Menyusun laporan tugas bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai dengan tugas yang dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya kepala bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan dibantu oleh :

- Kepala Seksi Pengaduan, Informasi dan Pelaporan Layanan
- Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan.



POTENSI DAN PELUANG

INVESTASI DI MALUKU

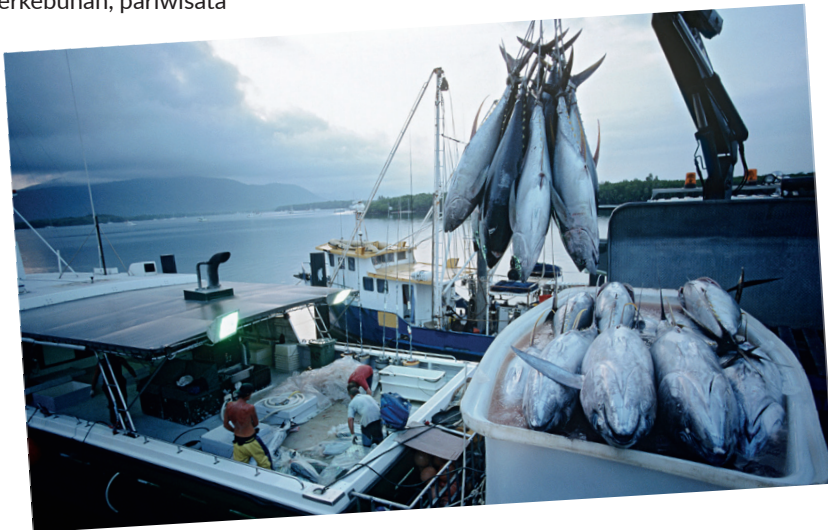
POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DI MALUKU

The Hidden Paradise of Investment

Maluku dianugrahi potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, hal tersebut tentunya membutuhkan perhatian dengan pengelolaan sumber daya alam tersebut dengan tepat guna.

Berbagai sektor unggulan Maluku yang dapat dikembangkan terfokus pada empat sektor unggulan yakni perikanan, perkebunan, pariwisata

dan memiliki 1.412 pulau, menjadikan Maluku memiliki potensi sektor perikanan yang sangat besar. Pula halnya dengan sektor pariwisata. Selain panorama bahari yang sangat elok nan mempesona, memiliki laut yang indah serta belum terjamah, cocok untuk dikembangkan resort yang memiliki nilai jual yang tinggi. Telah



pertambangan dan energi. Empat sektor tersebut belum tergarap maksimal oleh masyarakat dan juga investor. Potensi inilah yang bisa dimanfaatkan oleh investor baik dalam maupun luar negeri hingga dapat memberi multiplier effect untuk Maluku di masa yang akan datang.

Memiliki luas wilayah mencapai 712.480 Km², dimana memiliki daratan hanya 7,4 persen atau 54.185 km²,

terkenal beabad-abad tahun yang lalu mulai dari komoditas pala, cengkeh dan juga kelapa yang telah diperdagangkan ke belahan dunia semenjak masa Portugis menginjakkan kakinya di bumi rempah ini. Pada sektor pertambangan, Maluku memiliki potensi pertambangan emas, nikel dan tembaga. Dilalui oleh patahan geologi bumi, Maluku menyimpan cadangan minyak bumi yang belum terekplorasi secara maksimal.



Photo-photo: Web

POTENSI PERIKANAN TANGKAP

PERAIRAN laut Provinsi Maluku memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap yang sangat besar. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No; 47/KEPMEN-KP/2016, tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, JTB dan tingkat pemanfaatan SDI di WP NRI, tercatat bahwa Potensi Sumber Daya Ikan (SDI) di Perairan Maluku adalah sebesar 3,05 Juta Ton/ Thn yang tersebar di 3 WPP NRI yaitu: WP NRI Laut Banda dan sekitarnya, WP NRI Laut Seram sampai dengan Teluk Tomini, WP NRI Laut Arafura. Potensi sumberdaya perikanan tangkap tersebut, antara lain ikan Tuna (*Tunnus* sp) dan ikan Cakalang (*Katsuwonus pelamis*).

Ikan Tuna

- Potensi diperkirakan sebesar 104.968 ton pertahun dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 40.100 ton pertahun.
- Produksi tahun 2019 sebesar 30.106,4 ton/tahun atau 75% dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan.
- Daerah sentra produksi terdapat di MTB, Maluku Tengah, Buru, Bursel, Kep Aru, SBB, Ambon, SBT, dan MBD.
- Produk yang dipasarkan di Maluku, umumnya dalam bentuk produk primer seperti tuna segar dan tuna lain.



Peta Daerah Penangkapan Ikan di Maluku

Ikan Cakalang

- Potensi diperkirakan sebesar 211.040 ton pertahun dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 168.832 ton pertahun.
- Produksi tahun 2019 sebesar 50.095,ton atau 30% dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan.
- Daerah sentra produksiterdapat di Maluku Tengah, Ambon, Kepulauan Aru, Buru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara, dan Maluku Tenggara Barat.
- Produk yang dipasarkan di Maluku, umumnya dalam bentuk produk primer dan merupakan penyedia bahan baku.

Peluang Usaha

Peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh para calon investor adalah pengembangan usaha perikanan tangkap secara efisien dan lestari, industri penanganan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan tuna dan cakalang.

POTENSI PERIKANAN BUDIDAYA

“Dengan adanya luas lahan dan potensi yang masih begitu besar diharapkan dapat menjadi surga investasi bagi para investor dalam dan luar negeri “



PERIKANAN BUDIDAYA

Potensi Lahan Budidaya (sesuai RZWP3K) dan Pemanfaatan

Kabupaten/Kota	Potensi Lahan (ha)	Pemanfaatan Lahan (ha)
Kepulauan Tanimbar	9.813,54	1.000,12
Maluku Tenggara	1.455,96	4.680,11
Maluku Tengah	9.434,36	0,32
Buru	30.529,07	0,08
Kepulauan Aru	23.555,29	280,30
Seram Bagian Barat	14.701,11	13,58
Seram Bagian Timur	7.787,35	60,08
Maluku Barat Daya	50.468,03	108,14
Buru Selatan	18.539,75	0,01
Kota Ambon	2.064,07	1,44
Kota Tual	14.697,86	1.400,12
TOTAL	183.046,40	7.544,30



POTENSI lahan/perairan yang tersedia untuk pengembangan usaha budidaya laut di Maluku diperkirakan seluas 183.046,40 Ha, belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk budidaya laut, kegiatan yang telah dikembangkan secara komersial antara lain komoditas Rumput Laut, Ikan Kerapu, dan Mutiara. Sementara untuk budidaya air payau, pengembangan secara komersial pada komoditi Udang Windu dan Bandeng dengan daerah pengembangannya terutama di Pulau Seram dan Pulau Buru.

Potensi lahan budidaya laut yang

telah dimanfaatkan seluas 7.542,30 hektar, untuk berbagai kegiatan usaha budidaya laut seperti budidaya Rumput Laut, Ikan Kerapu, Mutiara, Teripang dan lainnya dengan jumlah produksi sebesar 620,783.79 ton.

PELUANG USAHA

Peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh para calon investor adalah membangun industri penanganan dan pengolahan rumput laut, pemasaran hasil budiya rumput laut dan Ikan Kerapu, serta pengembangan usaha budidaya mutiara dan udang.



No.	Komoditi Unggulan	Produksi (Ton)	Daerah Sentra Produksi
1.	Rumput Laut	218.255,00	Tual, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur.
2.	Ikan Kerapu	129,42	Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Seram Bagian Barat, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Ambon, Tual
3.	Tiram Mutiara	1.250,24	Kepulauan Aru dan Maluku Tenggara
4.	Udang	5.646,56	Maluku Tengah

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku



Photo-photo: Web



BIDANG PERKEBUNAN

MALUKU diperkirakan memiliki potensi lahan perkebunan dengan luas mencapai 1,29 juta hektar. Perkebunan di Maluku umumnya adalah perkebunan rakyat, disamping perkebunan besar milik negara maupun swasta. Hasil perkebunan yang menonjol terutama melalui usaha perkebunan rakyat adalah kelapa, cengkeh dan pala. Komoditas cengkeh

dan pala telah menjadi komoditas yang terkenal sejak jaman penjajahan Belanda.

PELUANG USAHA

Produk akhir usaha perkebunan di Maluku sebagian besar masih terbatas pada bentuk produk primer, sehingga sangat terbuka peluang investasi pembangunan industri hilir.

LUAS AREAL DAN PRODUKSI PERKEBUNAN RAKYAT DI MALUKU TAHUN 2020

No.	Komoditi Unggulan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Daerah Sentra Produksi
1.	Kelapa	115.163,9	103.777,16	Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara, Seram Bagian Barat, Buru Selatan, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya.
2.	Cengkeh	44.714,3	20.454,34	Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, dan Seram Bagian Barat.
3.	Pala	34.742,0	5.311,4	Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Buru Selatan, dan Maluku Tenggara.

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku

PELUANG USAHA BERBASIS KOMODITI UNGGULAN PERKEBUNAN

No.	Komoditi Unggulan	Peluang Usaha
1.	Kelapa	Pemasaran dan pengolahan utama atau limbah kelapa (seperti sabut, arang tempurung, dan gula kelapa)
2.	Cengkeh	Pemasaran dan pengolahan hasil (minyak atsiri).
3.	Pala	Pemasaran dan pengolahan hasil (minyak atsiri dan produk olahan lainnya).

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku



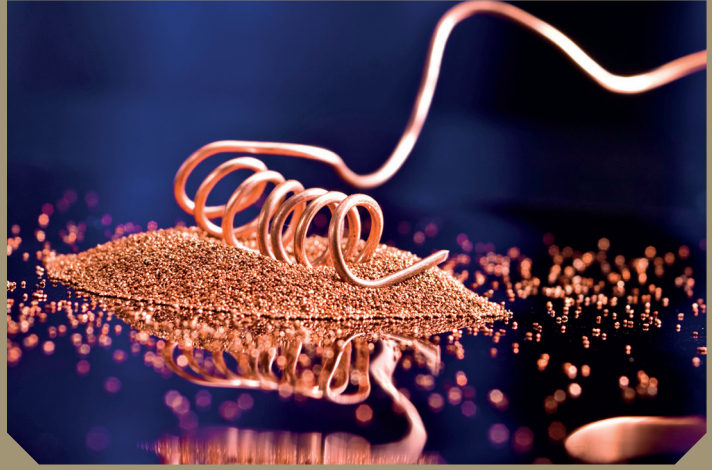
Photo-photo: Web

BIDANG PERTAMBANGAN

DITINJAU dari aspek geologi, Provinsi Maluku berada pada pertemuan 3 lempeng utama pembentuk kerak bumi yaitu lempeng Eurasia (Utara), lempeng Indo Australia (Selatan), dan lempeng Pasifik (Barat). Kondisi ini memungkinkan proses geologi yang menghasilkan mineralisasi berupa bahan galian (tambang) dan energi yang ekonomis bila dikembangkan.

Sesuai data yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku, beberapa bahan galian logam dan bukan logam terindikasi terdapat secara menyebar di berbagai daerah di Provinsi Maluku, antara lain:

- 1) Emas, terdapat di Pulau Romang dan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya.
- 2) Tembaga, terdapat di Desa Oma dan Aboru, Kabupaten Maluku Tengah; dan Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya.



- 3) Nikel, terdapat di Desa Ema, Hukurila, dan Gunung Nona, Kota Ambon; dan Desa Hualoy, Seriholo, Waesala, Supe, Kaibobu, Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 4) Batu Gamping, terdapat di Kecamatan Leksula dan Namrole, Kabupaten Buru Selatan; Pulau Kasuari, Kabupaten Seram Bagian Barat; Desa Sawai, Saleman, dan Yaputi, Kabupaten Maluku Tengah; dan Desa Selagor Air dan Urung, Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 5) Belerang, terdapat di Pulau Damar, Kabupaten Maluku Barat Daya; dan Pulau Serua, Teon, Nila, dan Manuk, Kabupaten Maluku Tengah.

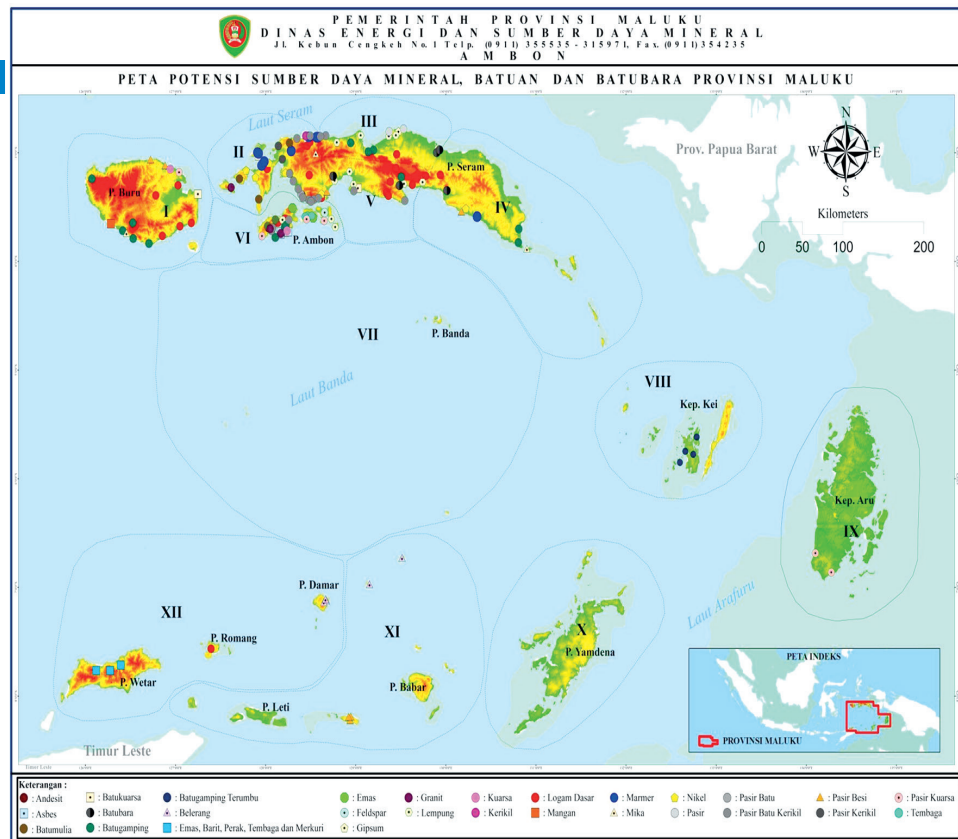


Peta Penyebaran Bahan Galian di Provinsi Maluku

“Begitu besarnya potensi bahan galian di Maluku dan masih banyak yang belum di eksplorasi hingga membutuhkan investasi”

POTENSI MINYAK DAN GAS BUMI

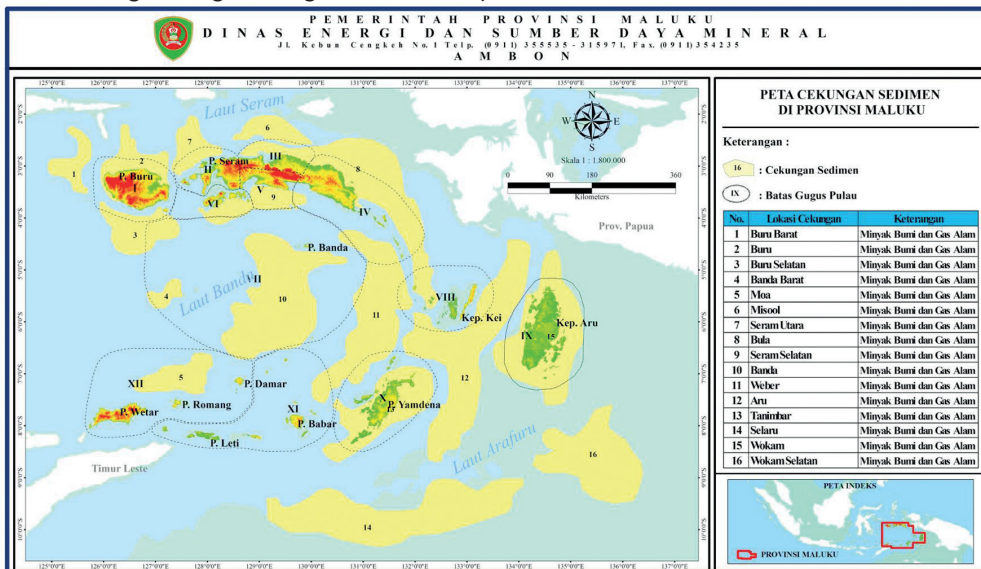
Potensi minyak dan gas bumi sebagai salah satu sumber energi, potensi bahan galian energi minyak dan gas bumi terdapat pada beberapa daerah di provinsi Maluku, baik di daratan maupun lepas pantai seperti Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara Barat, dan Kepulauan Aru.



Sumber : Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku



Potensi Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral di Provinsi Maluku



PELUANG USAHA

Peluang investasi pada kegiatan pertambangan di Provinsi Maluku masih terbuka luas, tidak hanya pada usaha pertambangan bahan galian logam dan bukan logam, tetapi juga bidang energi seperti energi panas bumi selain energi minyak dan gas bumi.

BIDANG PARIWISATA



tarik yang berbeda.

Adapun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku telah menyiapkan pula Pulau Gunung Api Banda di kepulauan Banda Naira, Pulau Marsegu di Kabupaten Seram Bagian Barat, Pulau Kassa di Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Pulau Pombo di kabupaten Maluku Tengah menjadi obyek wisata sejak 2016 lalu. Keempat pulau tersebut merupakan bagian dari 23 kawasan konservasi di Maluku. Keaslian kondisi alam dan kekhasan flora dan fauna menjadi nilai jual masing-masing pulau.

Beberapa event yang pernah digelar di Maluku antara lain, Festival Teluk Ambon, Pesta Rakyat Banda, Festival Budaya Banda, Festival Musik Jalur Rempah, Hari Pattimura, dan atraksi Pukul Sapu.

PELUANG USAHA

Peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh para calon investor adalah membangun “resort” dan jasa pariwisata.



PROVINSI Maluku memiliki beragam obyek wisata andalan baik wisata alam, budaya, serta peninggalan sejarah. Data Dinas Pariwisata kabupaten/kota se-Maluku tahun 2019 mencatat terdapat 280 wisata bahari, 191 wisata alam, 359 wisata sejarah/budaya, dan 14 wisata buatan di Provinsi Maluku.

Sumber daya pariwisata di Provinsi Maluku tidak dapat diragukan lagi keindahannya. Sebut saja wisata alam Pantai Ora di Kabupaten Maluku Tengah, Pantai Pasir Panjang di Pulau Kei, Gunung Kerbau di Pulau Moa, Pantai Naptuali di Pulau Damer dan sejumlah objek wisata lainnya. Selain wisata alam tersebut, Provinsi Maluku juga memiliki objek wisata sejarah zaman penjajahan, seperti Benteng Belgica di Pulau Banda, Benteng Duurstede di Pulau Saparua dan Gereja Tua di Negeri Hila. Wisata budaya, seperti Pukul Sapu di Mamala, Panggayo Perahu, dan Makan Patita turut memberikan daya

INFRASURUKTUR
INFRASURUKTUR
PENDUKUNG INVESTASI
INFRASURUKTUR
PENDUKUNG INVESTASI
PENDUKUNG INVESTASI

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG INVESTASI



LOKASI PELABUHAN TERINTEGRASI



Konsep Pengembangan Pelabuhan Terintegrasi

- Terminal Petikemas internasional dan domestik
- Terminal Roro
- Pelabuhan Perikanan (TPI dan Tempat Pengolahan)
- Kawasan industri dan logistik
- Terminal LNG dan Power Plant
- Fish Market bertaraf Internasional

Pengembangan **Pelabuhan New Ambon** diharapkan mengurangi **biaya logistik**, mengurangi **disparitas harga**, meningkatkan **keterjangkauan market**, menstimulasi **pertumbuhan ekonomi**, dan menciptakan **lapangan kerja**



Ambon New Port

Kepiawaian Gubernur Maluku, LIN dan Ambon New Port disetujui menjadi Program Strategis Nasional

AMBON new port merupakan salah satu langkah pemerintah pusat dalam mendukung Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Pelabuhan baru ini nantinya terintegrasi dengan pelabuhan logistik, pelabuhan perikanan, terminal Liquid Natural Gas (LNG), terminal peti kemas domestik dan internasional, terminal bongkar muat dan power plant. Menurut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, pembangunan ini sangat penting dilakukan, mengingat Pelabuhan Ambon (Yos Sudarso) berada di pusat kota yang padat sehingga mengakibatkan keterbatasan lahan untuk pengembangan pelabuhan. Dalam 10-15 tahun kedepan, pelabuhan kargo dan petikemas yang telah ada akan mencapai kapasitas

maksimum. Selain itu, akses pelayaran keluar dan masuk teluk Ambon yang cukup padat menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan.

Pembangunan pelabuhan dapat dikatakan sebagai investasi jangka panjang pemerintah dalam mendukung industri perikanan di kawasan Indonesia timur, khususnya Maluku. Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 yang meliputi 225 Proyek dan 1 Program. Kemudian, direvisi pada 2017 melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 hingga meliputi 245 Proyek dan 2 Program. Lalu, direvisi kembali pada 2018 melalui Perpres Nomor 56 Tahun 2018 yang meliputi 223 Proyek dan 3 Program. Sejak 2016

sampai 20 November 2020, sebanyak 100 proyek senilai Rp 588,9 triliun telah diselesaikan.

Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Melalui tangan dingin Gubernur Maluku, Murad Ismail, lobi beliau ke pemerintah pusat akhirnya membuahkan hasil. Program Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port akhirnya disetujui menjadi Program Strategis Nasional dan akan segera terealisasi di akhir tahun ini.

Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan groundbreaking (peletakkan batu pertama) dimulainya pembangunan Ambon New Port dan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi pada bulan November 2021 nanti.

Untuk memantapkan rencana pembangunan mega proyek tersebut, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan, mengundang Gubernur Maluku beserta sejumlah menteri terkait untuk membahas kesiapan pembangunan New Port Ambon dan LIN di Maluku. Rapat yang berlangsung secara virtual itu berlangsung pada Rabu (28/7/2021). "Pelabuhan sudah berkomitmen untuk membangun Pelabuhan Ambon Baru yang merupakan pelabuhan terintegrasi antara pelabuhan logistik dan pelabuhan perikanan serta industri perikanan di dalam satu kawasan," kata Menko Luhut Binsar Pandjaitan dalam pertemuan secara virtual.

Dirinya berharap, pembangunan New Port

Ambon dan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi ini dapat berjalan sesuai dengan jadwal karena direncanakan proyek strategis nasional ini akan diresmikan di akhirtahun 2023 mendatang.

"Kementerian Perhubungan dan KKP agar mempercepat proses pembahasan teknis pembangunan pelabuhan perikanan dengan melibatkan kementerian terkait dan Pemda Maluku untuk mempercepat pembangunan Ambon New Port," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Wahyu Trenggono, dalam rapat tersebut mengatakan, jumlah pelabuhan perikanan di sekitar Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 ada sebanyak 8 pelabuhan yakni PPN Ambon, PPN Tual, PPDobo, PP Benjina, PP Saumlaki, PPN Sorong, PPN Merauke dan PP Poumako. Dengan musim penangkapan selama delapan bulan, potensi yang dimiliki WPP 718 total produksinya sebesar 1.118.510 ton pertahun.



PUSAT PERIKANAN TERPADU



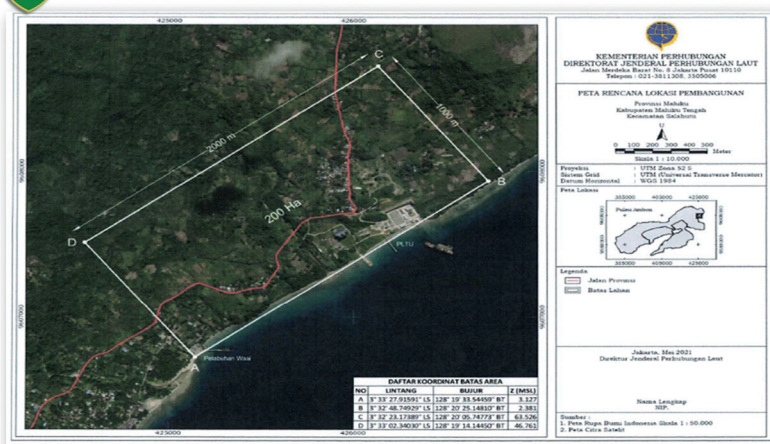
Rencana Lokasi Kawasan Pusat Perikanan Terpadu
(Telah sesuai dengan RTRW, RZWP-3-K, dan tidak berada pada Kawasan Lindung.)



Photo: Humas Maluku



PETA RENCANA LOKASI AMBON NEW PORT



“Semua ekspor di sekitar WPP 718 akan dilakukan dari Ambon New Port, termasuk dari PPN Merauke dan lainnya,” katanya. Sementara itu, Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku telah menyiapkan lokasi kawasan pusat perikanan terpadu untuk mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional seluas 700 hektar yang berlokasi di Pulau Ambon, diantara Desa Waai dan Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Sebanyak 39 hektar dari luasan tersebut menjadi bagian dari New Port Ambon seluas 200 hektar yang akan dibangun Pelabuhan Terintegrasi oleh Kementerian Perhubungan,” kata mantan Komandan Korps Brimob Polri tersebut.

Dikatakannya, lokasi pembangunan

pusat perikanan terpadu inilah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah, serta rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dimana lokasi ini tidak berada pada kawasan lindung.

“Sesuai kesepakatan rapat koordinasi Maluku sebagai LIN tanggal 28 Januari 2021 dilstana Negara, Pemerintah Provinsi Maluku siap mem-fasilitasi pembebasan lahan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, sesuai kesepakatan bersama telah dibagitugas untuk pemerintah daerah dan kementerian terkait. Kementerian Perhubungan bertanggungjawab atas pembangunan New Ambon Port, Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggungjawab menyiapkan bisnis perikanan, serta Kementerian Investasi dan BKPM bertanggungjawab terkait investasi. “Berbarengan dengan progres pembangunan New Ambon Port, maka kami mohon dukungan pembiayaan khusus. Kami juga mohon dukungan Pemerintah Pusat untuk dapat memproses Rancangan Peraturan Presiden tentang LIN untuk ditetapkan menjadi Peraturan Presiden,” tandasnya.

Turut mendampingi Gubernur Maluku dalam rapat virtual tersebut, Plh. Sekda Maluku, Kadis Perhubungan, Kadis Kelautan dan Perikanan, dan Kadis PUPR Provinsi Maluku, dan Hadir dalam rapat tersebut juga Gubernur Maluku Utara dan Papua Barat.

GELIAT INVESTASI

GELIAT INVESTASI

Perkembangan dan laporan investasi di Maluku kami sajikan kepada anda secara lugas



Ada Potensi Besar Selain Masela, Pertagas Siap Ekspansi Bisnis Gas di Maluku

JAKARTA –Potensi migas di Maluku tidak hanya Blok Masela, namun ada potensi gas lain yang sebenarnya sudah siap digarap di Blok Seram Non Bula yang dikelola konsorsium yang dipimpin CITIC Seram Energy Limited.

Musalam Latuconsina, Direktur PT Maluku Energi Abadi (Perseroda), mengatakan ada potensi gas di Wilayah Kerja Seram Non Bula yang diyakini dapat mendukung pasokan gas berbagai sektor, terutama yang sedang disiapkan yakni proyek strategis Lumbung Ikan Nasional serta memasok pembangkit eksisting dan baru di Provinsi Maluku. Ada beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dengan total kapasitas 70 Mega Watt (MW).

Jumlah potensi gas yang ada di Seram Nom Bula mencapai lebih dari 2 TriliunCubic Feet(TCF). Isu utama dari rencana pengelolaan potensi tersebut adalah keberpihakan pemerintah kepada daerah yang diharapkan mampu menciptakan pasar gas Maluku yang bersumber dari Lapangan Gas di Maluku.

"Penemuan cadangan gas pada 2012 di pulau Seram yang memiliki potensi hampir 3 TCF, namun belum dapat perhatian untuk dikembangkan.

“Kami upayakan dari kajian tadi ada produksi minyak 1.700 – 1.800 barel minyak per hari, barangkali ada gas associated-nya 2-3 MMscfd. Ini kan bisa kami monetisasi. Kelistrikan itu bicara lagi nanti sama PLN.” - Wiko



Dengan potensi yang ada, Musalam menargetkan akan bisa dibangun PLTMG tambahan sehingga total kapasitas yang akan tersedia dalam lima tahun bisa mencapai 500 MW dengan total kebutuhan investasi mencapai Rp12 triliun.

“Program BUMD Maluku Energi Abadi, kurang lebih lima tahun ke depan dari 2021-2025 kami punya target sesuai dengan potensi gas yang ada di Pulau Seram itu bisa ekuivalen dengan 500 MW. Itu target kami,” ungkap Musalam.

Wiko Migantoro, Direktur Utama Pertagas, mengatakan potensi yang ada di Maluku membuat peluang bisnis gas di Maluku juga terbuka. Tantangan utama memonetisasi cadangan gas adalah keekonomian yang dipengaruhi juga oleh ketersediaan infrastruktur. Pertagas akan hadir untuk mengisi kekosongan infrastruktur untuk menjangkau konsumen. Selain industri, pembangkit listrik juga menjadi target untuk penyaluran gas, hanya saja perlu koordinasi lebih lanjut dengan PT PLN (Persero).

Pertagas akan mulai mengkaji pemanfaatan gas yang kini sudah tersedia sekitar 3 juta kaki kubik per hari (MMscfd) untuk disalurkan ke industri kayu lapis. Untuk itu kemungkinan besar tahap awal akan dibangun pipa di sekitar wilayah kerja Seram Non Bula.

“Kami upayakan dari kajian tadi ada produksi minyak 1.700–1.800 barel minyak per hari, barangkali ada gas associated-nya 2-3 MMscfd. Ini kan bisa kami monetisasi. Kelistrikan itu bicara lagi nanti sama PLN. Industri kayu 3-5 MMscfd. Ada potensi sumber 3 TCF, tapi ini enggak bisa jadi apa-apa kalau misalnya market-nya belum terbentuk,” kata Wiko. (RI)

Sumber : dunia-energi.com

INOVASI

INOVASI

INOVASI DALAM PELAYANAN

"Lembaga pemerintahan tanpa kreativitas dan inovasi akan berakibat suatu organisasi mati suri."

(Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si)

Langkah Strategis
Percepatan Perizinan dengan
Mengintegrasikan Stage Holders
Dalam PTSP Provinsi Maluku

DEWASA ini segala aspek kehidupan dituntut untuk bersaing menunjukkan yang terbaik, karena yang terbaiklah yang akan dapat bertahan untuk tetap bersaing dalam panggung globalisasi. Menurut Zimmerer dan Scrborough inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan solusisolusi kreatif terhadap masalah dan peluang guna menumbuhkan usaha.

Lembaga pemerintahan tanpa kreativitas dan inovasi akan berakibat organisasi yang kurang berkembang dan kinerjanya akan selalu menjadi sorotan masyarakat, kritikan, dan apatis bagi institusi itu sendiri. Oleh karena itu kreativitas dan inovasi pada setiap lembaga pemerintah yang ingin maju harus menguatkan di internalnya terlebih dahulu, dengan demikian ketika di internalnya sudah kuat dan menghasilkan produk organisasi yang siap dan solid, otomatis ketika menghadapi permasalahan eksternal organisasi dapat diatasi. Berfikir dari hal tersebut DPMPST Provinsi Maluku melakukan Langkah inovasi guna memberikan layanan yang prima bagi para investor yang akan melakukan investasi di daerah Maluku.





INTEGRASI LAYANAN BPJS PADA PTSP PROVINSI MALUKU

*“Kita buat pengusaha itu tidak usaha bolak-balik ke BPJS, maka kita minta BPJS nya berkantor di PTSP”
(Dr. Ir.Syuryadi Sabirin, M.Si)*

**“Kalau Bisa
Dipermudah Kenapa
Musti Dipersulit “-
(Motto PTSP)**

MENGAMBIL langkah-langkah strategis yang inovatif dalam sebuah kebijakan adalah suatu tindakan yang layak dimiliki oleh seorang pemimpin di masa sekarang ini. Tidak terkecuali pelayanan yang dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku. Terkadang investor sering mengeluhkan alur perizinan yang berbelit-belit dimana adanya kelembagaan lain yang harus mereka dapatkan rekomendasinya sebagai rekomendasi dasar barulah izin di PTSP dapat dikeluarkan, hal tersebut memang adalah suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang investor namun memberikan kesan yang lama dan membosankan. Berdasarkan hal tersebut untuk tercapainya kelancaran pelayanan pada PTSP yang yang cepat, tepat, murah, dan mudah maka, Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi Maluku melakukan langkah-langkah Inovasi dengan mengundang stakeholder terkait untuk dapat menangani masalah tersebut.

Dilakukannya beberapa kali rapat dengan lembaga terkait khususnya BPJS dan OKPD provinsi Maluku terkait dalam pemberian izin, maka BPJS sebagai suatu lembaga pemberi rekomendasi dasar hingga dikeluarkannya izin Penanaman modal, oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP diberikan tempat untuk membuka layanan di kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi Maluku. Dengan dilakukannya langkah kebijakan tersebut beberapa pengusaha memberikan apresiasi yang tidak sedikit dengan membandingkan layanan sebelum dilakukan kebijakan tersebut. Pelayanan BPJS bagi pengusaha ada pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku hadir sesuai jam kerja kantor pemerintah yakni dari senin-Jum’at.

Diharapkan dengan kehadiran BPJS tersebut lebih mempermudah pengusaha dalam pengurusan izin penanaman modal.



PTSP

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU

Optimalisasi Pelayanan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

DALAM kondisi pandemi Covid-19, Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi Maluku mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar pelayanan publik tak terganggu. Transformasi ke arah digital itu diakselerasi dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi Maluku, Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si menegaskan bahwa pelayanan tetap diberikan di tengah pandemi Corona Virus Disease

(Covid19). Karena itu, pihaknya tak henti-hentinya menghadirkan terobosan agar pelayanan tetap berjalan dalam situasi bencana non alam ini. Hal ini dibuktikan dengan langkah penandatanganan izin-izin yang telah sesuai dengan persyaratan yang telah lengkap dapat dikirim lewat email, dan dapat ditandatangani secara elektronik langsung oleh Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Maluku dimana saja beliau berada hingga diharapkan pelayanan kepada pelaku usaha lebih optimal lagi.

SEPUTAR INVESTASI



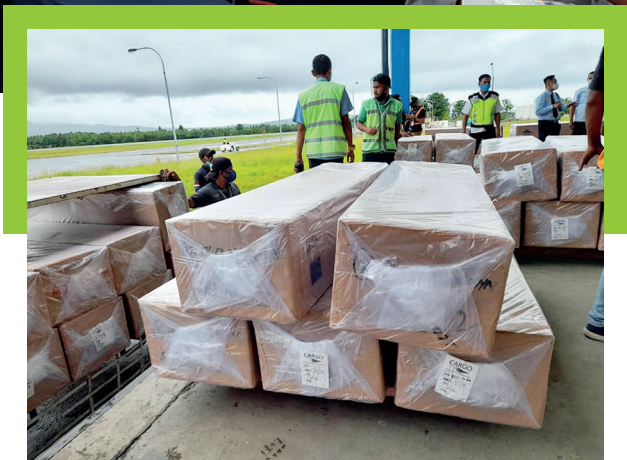
Gubernur Lepas Ekspor Tuna ke Jepang

Gubernur Maluku, Irjen Pol. (Purn) Murad Ismail, melepas ekspor komoditas perikanan berupa ikan tuna ke Narita, Jepang, Rabu 6 Januari 2021. Pelepasan ekspor ikan tuna ini ditandai dengan pemasangan label Bea Cukai dan penyerahan dokumen ekspor oleh Gubernur kepada PT. Peduli Laut Maluku. Ikan yang diekspor sebanyak 15 ton, menggunakan pesawat Kargo Garuda Indonesia Citilink PK-GGC.

Pelepasan ekspor berlangsung di Terminal Kargo, Bandara Internasional

Pattimura, Ambon, dihadiri Sekda Maluku Kasrul Selang, Kadis Indag Elvis Pattiselano, Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Abdul Haris, Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Ismail Usemahu, Karo Humas dan Protokol Setda Maluku Melky Lohy, Tim Percepatan Ekspor Maluku, Kadin Maluku, Pimpinan PT. Peduli Laut Maluku, para pelaku usaha sektor perikanan dan pimpinan instansi vertikal BUMN/BUMD terkait.

Dalam arahnya, Gubernur mengatakan, ekspor dan investasi adalah kunci penting kemajuan ekonomi. Sebab, dengan ekonomi yang tumbuh dapat menekan kesenjangan dan kemiskinan. Dinamika ekonomi dunia yang terus berubah dan menimbulkan berbagai dampak bagi sejumlah negara termasuk Indonesia dan Maluku, secara khusus memaksa partisipasi setiap daerah memperluas wilayah pasar sebagai solusi mengatasi dampak resesi global, agar mampu bertahan di kancah





perdagangan internasional.

“Atas dasar ini, Pemda Maluku telah mempersiapkan langkah dan strategi baru yang disebut Diversifikasi Pasar dan Produk. Melalui strategi ini, pasar tujuan ekspor kini beralih ke sejumlah negara yang menyatakan potensi pasar yang cukup signifikan untuk dieksplorasi,” katanya.

Menyangkut hal ini, Gubernur menyebutkan, Garuda Indonesia menemui dirinya beberapa waktu lalu untuk mendiskusikan beberapa hal penting untuk ditindaklanjuti. Garuda Indonesia akan mengoperasikan penerbangan dengan kargo khusus dari Ambon ke Narita Jepang via Manado Sulawesi Utara. Hal ini merupakan kesempatan baik untuk dimanfaatkan eksportir Maluku yang ingin melakukan ekspor ke Jepang. Sebab, waktu tempuh

lebih cepat sehingga kualitas komoditi ekspor yang tiba di Narita akan masih lebih baik dan segar.

“Tindak lanjut dari pertemuan tersebut, maka pada hari yang berbahagia ini kita semua hadir untuk menyaksikan dan melakukan ekspor tuna fresh untuk pertama kali dari Ambon ke Jepang, melalui Manado yang dilakukan PT. Peduli Laut Maluku sebanyak 15 ton, menggunakan pesawat kargo khusus Garuda Indonesia,” lanjutnya.

Menurut Gubernur, peluang ekspor saat ini sangat terbuka lebar. Namun pelaksanaannya memerlukan sinergi, apalagi kondisi global yang masih dilanda pandemi Covid-19.

Ia berpesan kepada eksportir, bahwa di tengah pandemi ini masih ada peluang untuk meningkatkan ekspor, selama jeli menemukan peluang dan inovasi baru. Gubernur akan terus mendorong pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan di Maluku, sehingga hasil laut benar-benar menjadi komoditas unggulan ekspor yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Semoga ekspor ini terus berkelanjutan, dan dapat diikuti eksportir lainnya. Saya mengapresiasi PT. Peduli Laut Maluku dan seluruh pihak yang telah bekerjasama atas peran sertanya dalam peningkatan ekspor Maluku. Semoga dapat membawa hasil yang menggembirakan di masa mendatang,” harap Gubernur. (*)



Program LIN Terwujud

Maluku Jadi Sentra Ekonomi Baru di Indonesia Timur



Penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) berdampak besar dan menjadikan Provinsi Maluku sebagai pusat ekonomi baru di Kawasan Timur Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) akan membawa dampak besar, dan menjadikan provinsi ini sebagai pusat ekonomi baru di Kawasan Timur Indonesia

(KTI).

“Provinsi Maluku harus tumbuh menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia, karena sejak dulu terkenal kaya akan potensi kelautan dan perikanannya,” kata Menteri Trenggono, saat meninjau lokasi pembangunan Ambon New Port dan pelabuhan perikanan terintegrasi di Kawasan Desa Tulehu, Waai dan Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, 5 Februari 2021.



Menteri Kelautan datang bersama Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia, serta sejumlah pejabat eselon I dari ketiga Lembaga, serta Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Rombongan Menteri dan jajaran pentingnya itu datang untuk meninjau lokasi darat maupun pesisir pantai di tiga desa yang akan dijadikan area pengembangan Ambon New Port dan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi.

Pengembangan Maluku sebagai lokasi LIN, bukan tanpa alasan karena daerah ini terkenal sangat kaya akan potensi perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya. Maluku memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah, sebab didukung oleh tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan

(WPP) yakni WPP 714, 715 dan 718. Ketiga WPP tersebut mencakup Laut Seram, Laut Banda, Laut Aru dan Laut Arafura.

Pengembangan Maluku sebagai LIN hingga saat ini, terus dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait, dengan rutin menggelar rapat koordinasi melibatkan pemerintah daerah serta peninjauan langsung ke lokasi.

"Kunjungan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta Deputy Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin, merupakan bagian dari realisasi Maluku sebagai LIN," katanya.

Kedua menteri yang didampingi puluhan pejabat eselon I dari



sejumlah kementerian terkait itu mengunjungi Negeri Tulehu, Waai dan Liang, yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan Ambon New Port dan pelabuhan perikanan terpadu terintegrasi.

Kedua program tersebut adalah proyek strategis nasional yang dibiayai pemerintah pusat melalui APBN. Proyek strategis nasional ini sekaligus merupakan bagian dari implementasi Maluku sebagai LIN.

Pengembangan Maluku sebagai lokasi LIN, nantinya dibangun kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan guna menunjang proses produksi, pengolahan hingga pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien.

Di dalamnya meliputi kantor pelabuhan perikanan, dermaga, cold storage dan pabrik es, gedung laboratorium, tempat pemasaran ikan modern, hingga pusat kuliner.

Infrastruktur pendukung lain yang akan dibangun juga seperti kawasan industri pengolahan ikan dan industri galangan kapal. Tak hanya itu, juga akan disiapkan

sarana untuk fasilitasi permodalan dari perbankan, serta fasilitasi asuransi bagi pekerja di sektor kelautan dan perikanan.

Pihak KKP juga akan mengatur wilayah-wilayah penangkapan perikanan berdasarkan zonasi yang bertujuan untuk menambah pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya minta Dirjen PT membuat semacam zonasi di wilayah-wilayah penangkapan dan dihitung lagi berapa kapasitas perikanan yang ada. Kemudian dibuat semacam konsesi supaya penerimaan negara juga menjadi besar. Kalau penerimaan negara besar, maka penerimaan daerah juga akan menjadi besar, ekonomi di daerah itu menjadi besar maka rakyatnya sejahtera," paparnya.

Dengan adanya LIN, estimasi produksi perikanan yang bisa dihasilkan dari sub-sektor perikanan tangkap dan budidaya mencapai 750 ribu ton per tahun. Sedangkan tenaga kerja yang terserap

diperkirakan lebih dari 30 ribu orang.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan paling lama tahun 2022 pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan Maluku sebagai LIN harus sudah bisa berjalan. Menurutnya, pihak independen juga dilibatkan dalam peninjauan lokasi untuk memberi masukan supaya pembangunan LIN benar-benar bermanfaat ke depannya.

"Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antara pelabuhan, kawasan industri perikanan dan pelabuhan perikanan harus disatukan di satu kawasan. Sesuai arahan Presiden ini harus segera dilakukan, karena di hampir semua provinsi investasi sudah dilakukan. Yang belum hanya di Maluku," pungkasnya.

Sedangkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan infrastruktur dasar akan dilakukan menggunakan dana APBN, baik dari Kemenhub dan KKP. (*)





DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI MALUKU

MAKLUMAT PELAYANAN

**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN,
SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG
TELAH DITETAPKAN DAN APABILA MENGINGKARI,
KAMI SIAP MENERIMA KONSEKUENSI / SANKSI SESUAI
DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU**

Ambon, 04 February 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP



08240211539



08240211539



PTSP.Promal



PTSP.Promal



pengaduanptspromal@gmail.com



dpmptsp-maluku.com



VISI DAN MISI PTSP

VISI

**“Menjadi PTSP yang terbaik dan terpercaya
dalam pelayanan untuk menciptakan suasana
yang kondusif dalam berinvestasi”**

MISI

- 1. Mewujudkan mutu pelayanan yang memuaskan berbasis pelayanan prima melalui sistem manajemen yang konsisten, efektif dan efisien.**
- 2. Melakukan koordinasi dan kolaborasi secara intensif dengan Stakeholder terkait di kabupaten/kota, Provinsi dan Pusat.**
- 3. Meningkatkan dan Mendorong kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia**
- 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan dan sumberdaya lainnya guna mengoptimalkan aktivitas PTSP.**



08240211539



08240211539



PTSP.Promal



PTSP.Promal



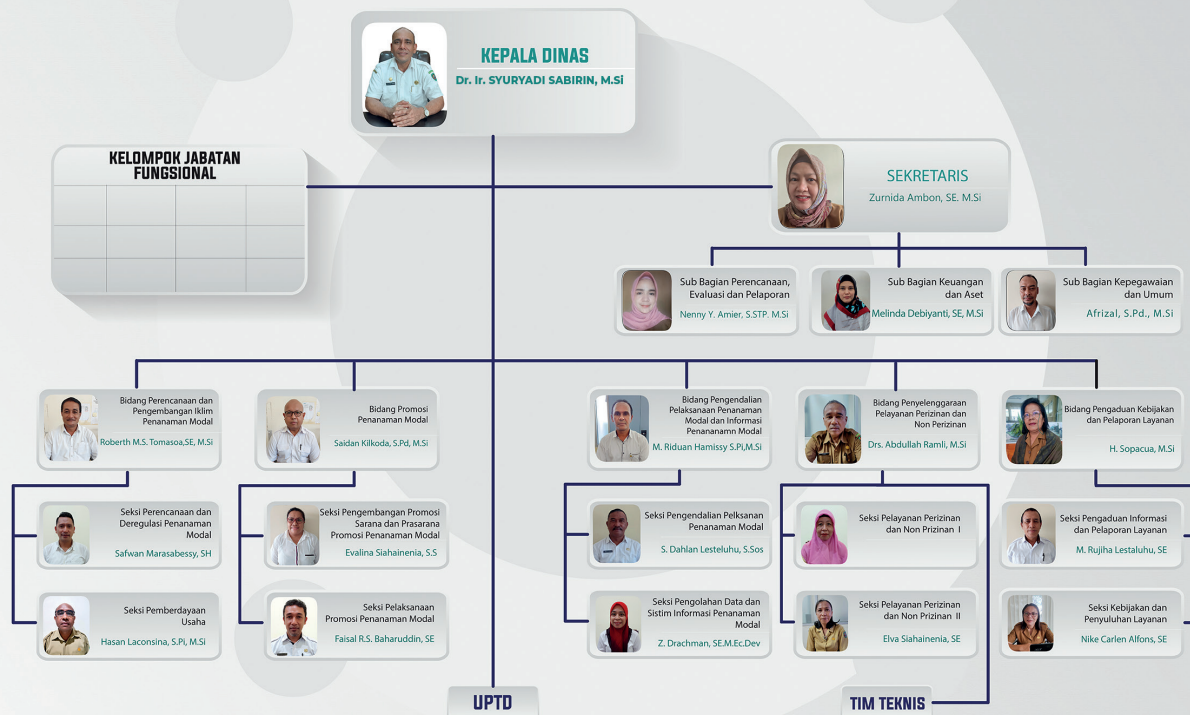
pengaduanptspromal@gmail.com



dpmptsp-maluku.com



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



“KAMI SIAP MELAYANI BUKAN DILAYANI”

JANJI LAYANAN

1. Melaksanakan pelayanan perizinan dan Non Perizinan dengan hati yang jujur
2. Melaksanakan pelayanan perizinan dan Non Perizinan dengan menjunjung tinggi kehormatan tanpa ada unsur KKN
3. Melaksanakan pelayanan perizinan dan Non Perizinan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan

Ambon, 04 February 2020



08240211539



08240211539



PTSP.Promal



PTSP.Promal



pengaduanptspromal@gmail.com



dpmpstsp-maluku.com

NEWS



Duta Besar Seychelles Tertarik untuk Berinvestasi di Maluku

Gubernur Maluku Murad Ismail memenuhi undangan Duta Besar Negara Seychelles untuk Indonesia, Niko Barito untuk membahas rencana investasi Negara Seychelles di Maluku. Dalam pertemuan yang digelar di Konjen Seychelles di daerah Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (24/4/2021), Duta Besar mempertemukan Gubernur Maluku Murad Ismail dengan Alain St. Ange selaku Presiden Dewan Pariwisata Afrika. Dalam pertemuan tersebut, dibicarakan tentang rencana Negara Seychelles untuk berinvestasi di Maluku berupa rencana investasi ekonomi maritim yang berbasis pariwisata di provinsi Maluku.

Ditambahkan oleh Alain St.

Ange, bahwa Maluku memiliki potensi besar padasisi ekonomi maritimnya. Sehingga tinggal dikembangkan saja secara terstruktur dan terpusat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Menyambut hal tersebut, Gubernur Maluku Murad Ismail mendukung niat baik dan perhatian pemerintah Syechelles untuk berinvestasi sekaligus mengembangkan pariwisata dan ekonomi maritim di Maluku sehingga Gubernur berjanji akan membantu agar rencana investasi ini dapat berjalan dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Maluku .

Sumber : Website

Rangkaian Kunjungan Kerja Kepala BKPM RI ke Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku



bahkan listrik belum masuk disana.

Bahlil Lahadalia berkomitmen, untuk mendorong percepatan pembangunan di Kecamatan Banda khususnya Pulau Rhun. Hanya saja pembangunannya mengalami hambatan dikarenakan infrastruktur yang minim. Bahlil Lahadalia juga mendorong pengembangan sektor industri dalam hal ini perikanan serta pengembangan perkebunan pala yang sekarang sementara dilakukan revitalisasi agar investasi bisa segera masuk sehingga dapat memberikan manfaat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Sumber : web)

KEPALA Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Republik Indonesia Bahlil Lahadalia, melaksanakan kunjungannya di pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis 1 April 2021.

Setibanya di sana Bahlil Lahadalia memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Banda Neira dan dilanjutkan dengan memimpin rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Provinsi Maluku. Dalam rakor tersebut Lahadalia bertindak untuk membuka acara tersebut, sekaligus memberikan arahan.

Pada Hari Jumat, 2 April 2021, Bahlil Lahadalia beserta rombongan berangkat dari pelabuhan Banda Neira menuju ke Pulau Rhun. Seperti diketahui pulau Rhun merupakan saksi sejarah pertukaran dengan Pulau Manhattan antara bangsa Belanda dan Inggris, dalam proses perdagangan rempah-rempah, dan saat ini pulau Manhattan yang dulunya hanya menjadi pos dagang bulu hewan, berubah menjadi kota paling maju di dunia, dan pulau Rhun sampai sekarang masih tertinggal, dan



Gubernur Maluku Pertegas Peran DPM-PTSP Kelola Perizinan Usaha



AMBON - Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Hadirnya PP tersebut, merupakan dasar kepastian hukum agar penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Menyikapi hal itu, Gubernur Maluku Murad Ismail, mempertegas peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) provinsi Maluku dalam penyelenggaraan izin usaha di daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Maluku Kasrul Selang,

ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Asistensi Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan kabupaten/kota se-Maluku, yang diselenggarakan DPM-PTSP Provinsi Maluku, di Ambon, Kamis (24/6/2021).

Gubernur dalam sambutan tertulisnya juga mengatakan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, yang dikenal dengan PTSP adalah pelayanan yang terintegrasi dalam suatu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan, sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan, melalui satu pintu.

"Dengan keluarnya UU Nomor 11 Tahun 2020, tentang cipta kerja dengan turunan peraturan pemerintah sebanyak 45 peraturan, dan Perpres sebanyak 4 peraturan, yang memuat secara garis besar, tentang kemudahan berinvestasi dan perizinan," katanya.

Menurutnya, PTSP merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam pengurusan perizinan dan non perizinan serta kegiatan lainnya, sebagai perwujudan kepedulian pemerintah kepada pelaku usaha, dan masyarakat secara umum untuk kemudahan memperoleh legalitas perizinan berusaha.

“

Prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan adalah melayani, maka PTSP menjadi media interaksi, antara pemerintah dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan”

-Gubernur Maluku-



Photo: Humas Maluku

“Prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan adalah melayani, maka PTSP menjadi media interaksi, antara pemerintah dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan,” ujarnya.

Gubernur menjelaskan, sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Risk Basic Approach (RBA), dan sebagai implementasi dari UU Nomor 11 Tahun 2020, tentang cipta kerja, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. “Hal ini melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Rakor berlangsung selama tiga hari, sejak tanggal 23 hingga 25 Juni 2021. Sedangkan peserta yang hadir dalam Rakor ini adalah perwakilan dari DPMPSTP/PUPR se-Maluku, Biro Pemerintah, Organisasi, Hukum dan Ham, serta stakeholder lingkup provinsi lainnya. Turut hadir Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Maluku, Syuryadi Sabirin.

(sumber : malukuterkini.com)



Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
PROVINSI MALUKU